

NEGARA TIDAK BOLEH KALAH DENGAN KEKERASAN DARI MANA PUN Perang Pencitraan Menjelang Pemilihan Presiden 2009

Harry Budiman

*Menanggapi insiden kekerasan pada 1 Juni 2008 di lapangan Monumen Nasional (Monas), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan **negara tidak boleh kalah dengan kekerasan dari mana pun** karena Indonesia adalah negara hukum. Ini negara hukum, dan dalam negara hukum tidak bisa warga negara melakukan kekerasan pada warga negara lainnya, karenanya kejadian-kejadian semacam itu patut disesalkan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warga dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya dan juga menciptakan rasa aman.*

Insiden kekerasan di Monas.

Berepatan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2008 bertempat di lapangan Monas Jakarta, telah terjadi insiden kekerasan diikuti dengan tantangan terbuka oleh satu aktor non negara (*non-state actor*) terhadap wibawa negara (*sovereignty of the state*). Sejumlah massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Penyerangan dilakukan

ketika massa AKKBB tengah berkumpul untuk melaksanakan peringatan hari kelahiran Pancasila, sementara pada hari dan di tempat yang sama berkumpul pula sejumlah organisasi lain dengan maksud yang berbeda. Akibat serangan dengan menggunakan benda-benda keras seperti kayu, bambu dan pentungan, sedikitnya 12 orang mengalami luka parah dan puluhan lainnya luka ringan. Hingga malam harinya tidak seorang pun pelaku penyerangan yang ditahan oleh pihak kepolisian. Bahkan dalam konperensi pers yang digelar di markas FPI sesudah insiden terjadi, Ketua FPI Habib Rizieq Shihab dengan suara lantang menyatakan akan melakukan perlawanan jika ada satu orang dari anggota FPI yang ditangkap.

Insiden kekerasan di lapangan Monas merupakan suatu babak baru dalam sejarah Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Sikap pemerintah segera menjadi sorotan ketika harus menghadapi situasi seolah hukum tak berdaya menjangkau *non-state actor* yang jelas-jelas tidak hanya melakukan pelanggaran hukum lewat aksi kekerasan terhadap pihak lain, tetapi juga menyinggung kewibawaan negara. Aksi kekerasan ter-

sebut dilakukan terhadap sekelompok anak bangsa yang sedang melakukan penghormatan terhadap ideologi negara yang sah secara hukum nasional di lokasi yang beratribut Monas (kawasan ring I pusat pemerintahan). Meskipun demikian, aparat keamanan (penegak hukum) tidak segera melakukan tindakan tegas dan konkrit.

Babak baru ini tentu menjadi ton-tonan yang menarik bagaimana pemimpin nasional akan bertindak, baik dari elemen-elemen bangsa sendiri maupun datang dari luar negeri. Dari Singapura misalnya, spontan muncul berbagai pertanyaan yang intinya ingin mengetahui bagaimana SBY "... *to crack down the hardliner*". Dalam kaitan ini berbagai pihak akan menilai kualitas *leadership* dan *state-manship*, *national policy* yang akan ditempuh, dengan catatan Indonesia apakah belum memiliki semacam *national security strategy*, bagaimana wujud konstruksi manajemen nasional untuk penanganan masalah keamanan domestik, dan *mode of operation* yang akan ditempuh untuk menangani kasus-kasus serupa.

Reaksi di dalam negeri terhadap insiden kekerasan di Monas datang beragam dari berbagai elemen. Ketua

FPI Habib Rizieq Shihab menegaskan insiden yang terjadi di Monas merupakan tanggung jawab AKKBB. Untuk itu tokoh-tokoh yang diduga sebagai aktor intelektual di balik insiden Monas yang berjumlah 289 orang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat nama-nama seperti K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais, Gunawan Mohamad, Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis. Dalam pernyataan sikapnya tentang insiden Monas, Komando Laskar Islam menyatakan bahwa insiden Monas terjadi akibat provokasi dari pihak pendukung Ahmadiyah yang menamakan dirinya AKKBB. Ini semua terjadi menurut pengamat akibat kelambanan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk membubarkan aliran sesat Ahmadiyah sesuai fatwa MUI tahun 2005 dan rekomendasi dari Bakorpakem tahun 2008.

Sementara itu sedikitnya di 30 kota se-Indonesia telah digelar aksi meminta pembubaran FPI. Tidak dinafikan bahwa sebagian masyarakat menilai aksi-aksi tertentu FPI sudah identik dengan kebrutalan dan tindak anarkhis. Di DPR, sekitar 40 anggota DPR yang tergabung dalam kaukus

Parlemen Pancasila menandatangani dukungan agar FPI dibubarkan menyusul insiden rusuh Monas. Dukungan berasal dari berbagai fraksi di DPR, mayoritas dari FPDIP dan FPKB, sementara anggota Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi PPP tidak ada yang membubuhkan tandatangan.

Menyusul insiden Monas, Presiden SBY segera menggelar sidang kabinet terbatas di jajaran Menko Polhukam pada 2 Juni 2008. Dalam konferensi pers sesuai sidang, Presiden SBY menyatakan seperti yang tercantum pada awal tulisan ini. Sikap tegas Presiden SBY tampaknya segera mendorong pihak kepolisian untuk melakukan tindakan hukum secara tegas dengan menangkap sejumlah anggota FPI, delapan orang di antaranya telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan ditahan, termasuk Ketua FPI Habib Rizieq Shihab. Sementara itu beberapa orang lainnya telah dimasukkan dalam DPO (Daftar Pencarian Orang), salah seorang di antaranya adalah Panglima Komando Laskar Islam, Munarman. (Catatan, Munarman akhirnya menyerahkan diri pada polisi pada 9 Juni 2008 setelah diterbitkannya SKB tentang Ahmadiyah).

Meskipun terkesan lamban, namun sikap tegas Presiden SBY dengan mengambil tindakan hukum setidaknya telah mengangkat popularitasnya di mata masyarakat yang sebelumnya sempat menurun dalam beberapa minggu terakhir menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun pada dasarnya tindakan hukum saja kiranya belum cukup. Unsur militer (TNI) sudah seharusnya dilibatkan karena insiden Monas tidak lagi semata-mata sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, tetapi lebih dari itu sudah merambah masalah kedaulatan negara dan bahkan bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar.

Dalam kaitan ini ada tuduhan bahwa insiden bentrokan antar organisasi masyarakat di kawasan Monas merupakan upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas masalah kenaikan harga BBM belum lama ini. Pihak pemerintah sendiri menolak keterkaitan insiden Monas dengan isu kenaikan harga BBM. Namun pencermatan di lapangan menunjukkan bahwa aksi-aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM di beberapa daerah memang mulai tampak mereda. Sebaliknya aksi massa menuntut pembubaran FPI

semakin marak terutama dilakukan oleh massa "pendukung Gus Dur" meskipun pihak PBNU menolak dilibatkannya NU dalam kasus Monas dan menghimbau berbagai pihak agar tidak menyeret-nyeret NU dalam kasus itu. Sebagai catatan, Gus Dur adalah *prominent figure* yang berada di balik AKKBB.

Di tengah hingar-bingarnya tuntutan sebagian masyarakat agar FPI segera dibubarkan, dari tempat tahanan Habib Rizieq Shihab tampaknya berhasil membangkitkan semangat "melawan" setelah sebelumnya sempat *cooling down*. Pada 9 Juni 2008 sejumlah massa ormas Islam di antaranya FUI dan MUI (diperkirakan berjumlah 12.000 orang) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka menuntut pembubaran Ahmadiyah, dilanjutkan aksi serupa di Polda Metro Jaya, menuntut pembebasan Ketua FPI.

Kemungkinan jumlah massa pendukung FPI akan bertambah ketika FPI menanggapi isu kebersamaan Islam untuk kebangsaan bebas dari campur tangan pihak asing (baca : AS) dalam insiden Monas. Isu semacam ini bukannya tak berdasar dengan menunjuk kunjungan Dubes AS kepa-

da anggota AKKBB yang menjadi korban kekerasan FPI. Bahkan melalui *press release* yang diedarkan di Indonesia, Kedubes AS di Jakarta secara resmi mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan FPI dengan alasan aksi tersebut dapat mengancam kebebasan beragama di Indonesia. Dewan Keamanan PBB diperingatkan juga berpihak pada sikap tegas SBY dalam merespons "tantangan" FPI, juga dari berbagai pihak yang melihat fenomena bangkitnya *non-state actor* sebagai "*clear and present danger*".

Di dunia internasional masalah *non-state actor* sudah mendapatkan atensi yang sangat serius. Di Lebanon misalnya, Hizbollah memiliki kekuatan lebih baik dan superior ketimbang tentara dan polisi nasional Lebanon sendiri, bahkan sudah mendemonstrasikan bahwa mereka mampu berperang melawan Israel yang memiliki satuan militer (darat, laut dan udara) yang sangat terlatih dan termodern di dunia. Pemerintah Lebanon tidak mampu menetralsir kekuatan Hizbollah, tetapi situasi segera berbalik ketika ada dukungan (*military power*) dari PBB, di samping terpilihnya Panglima Angkatan Bersenjata (tokoh netral) sebagai

Presiden Lebanon dalam pemilihan yang baru saja berlangsung.

Terlepas dari tuduhan adanya rekayasa upaya pengalihan isu politik, bagaimana pun insiden kekerasan yang terjadi di kawasan Monas, Jakarta pada 1 Juni 2008 tampaknya dapat memberikan keuntungan politik terhadap posisi Presiden SBY.

Popularitas SBY.

Tekanan-tekanan politik terkait dengan kenaikan harga BBM menjadi berkurang menyusul insiden kekerasan di Monas, setidak-tidaknya isunya kemudian beralih pada masalah pro dan kontra FPI dan Ahmadiyah. Tekanan politik dalam bentuk aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM kembali muncul setelah dipicu oleh kematian Maftuh Fauzi, seorang mahasiswa peserta demonstrasi korban kekerasan aparat kepolisian ketika terjadi bentrokan di kampus Universitas Nasional Jakarta tepat pada saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Kegiatan demonstrasi anti kenaikan harga BBM ditengarai semakin intens, bahkan cenderung diwarnai gejala anarkhisme. Aksi unjuk rasa "mahasiswa" seperti yang

terjadi pada 24 Juni 2008 di depan gedung DPR/MPR dan kampus Ar-majaya Jakarta memperlihatkan semakin kuatnya fenomena penggembosan terhadap citra SBY, apalagi setelah DPR meloloskan hak angket tentang kenaikan harga BBM. Aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah lain seperti Yogyakarta, Malang, Kediri, Surabaya, Makassar dan daerah-daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Riset Indonesia (LRI), popularitas SBY pada Desember 2007 mencapai 43,3% , sementara di bulan Mei 2008 popularitasnya menurun hingga 7,7% menjadi 35,6%. Bahkan menurut hasil survei Indo Barometer pada 5-16 Juni 2008, popularitas SBY menurun lagi hingga angka 20,7% sementara popularitas Megawati Sukarnoputri mencapai 30,4%. Survei CSIS tentang "Perilaku Pemilih Indonesia 2008" yang diumumkan pada 15 Juli 2008 menunjukkan bahwa popularitas Megawati 23,2%, mengungguli SBY yang hanya memperoleh 14,7%, diikuti Sri Sultan Hamengku Buwono X (8,8%). Dalam kaitan ini tantangan bagi SBY agar popularitasnya tidak terus menurun adalah bagaimana mengelola manajemen krisis akibat kenaikan

harga BBM dengan baik. Keberanian SBY untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populis apabila diiringi pengelolaan krisis yang baik, bukan tidak mungkin membuat rakyat akan kembali memilihnya pada ajang pemilihan presiden mendatang (2009).

Dalam perkembangannya, insiden Monas ternyata telah memunculkan beberapa fenomena yang perlu dicermati, menyangkut popularitas Presiden SBY di dalam maupun luar negeri. Tekanan politik di dalam negeri terhadap pemerintah yang merupakan imbas dari insiden Monas masih cukup berat, apalagi menyusul beredarnya *black campaign* yang menyatakan bahwa insiden Monas adalah hasil rekayasa pemerintah sendiri, bahkan disertai isu dengan dukungan dana sebesar Rp 10 milyar. Masih ada isu lain, misalnya dalam rangka "membalas" serangan kubu Wiranto yang sangat pedas. Semuanya terkesan sebagai upaya untuk mengalihkan isu terkait dengan kenaikan harga BBM. Keputusan menaikkan harga BBM segera diikuti dengan merosotnya popularitas Presiden SBY, tampaknya harus dibayar mahal dengan sejumlah kebijakan susulan yang diharapkan dapat meng-

angkat kembali citranya, terutama menjelang pemilihan presiden 2009.

Penetapan status tersangka terhadap mantan Deputy V Kepala BIN, Muhandi PR dalam kasus pembunuhan Munir dapat dipahami tak terlepas dari upaya pemerintah untuk mendorong popularitas di tengah situasi yang kian memanas. Fenomena ini dinilai sebagai suatu langkah berani pemerintah dan bentuk konsistensi Presiden SBY atas penanganan masalah HAM di Indonesia. Meski masih akan terus berproses, namun kebijakan ini akan lebih mendekatkan Presiden SBY dengan sejumlah aktivis HAM yang selama ini belum pernah terjadi secara serius. Namun terungkapnya dua buah surat dari anggota-anggota Kongres AS kepada Presiden SBY masing-masing tertanggal 27 Oktober 2005 dan 3 Nopember 2006 berkaitan dengan penuntasan kasus Munir, setidaknya tidaknya pamor SBY yang selama ini dianggap oleh sebagian pihak dekat dan "patuh" kepada kepentingan AS menjadi semakin transparan. Sementara itu perkembangan yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Agung, sejumlah petinggi Kejaksaan Agung saat ini tersandung kasus suap terkait dengan dana Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (BLBI) atas nama Sjamsul Nursalim. Proses penyidikan masih terus bergulir, namun kebijakan ini secara tidak langsung juga mengangakat popularitas Presiden SBY yang dianggap konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin kronis di negeri ini.

Bagaimana pun, upaya menjatuhkan kredibilitas pemerintah c/q Presiden SBY tampaknya terus berlangsung. Penyerahan diri Munarman kepada pihak berwajib menyusul terbitnya SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah bisa saja merupakan satu *test case* bagi seorang Munarman untuk melancarkan aksi-aksi lanjutan dengan lebih leluasa. Dengan "*bekerja di kalangan musuh*", perlawanan dan serangan balik segera dilancarkan untuk menghancurkan sasaran-sasaran terpilih dan dipertajam dengan *political pressure* melalui aksi-aksi demonstrasi. Metode serupa dulu juga dilakukan oleh orang-orang komunis menjelang G-30-S/PKI sehingga tercipta suasana *political chaotic*. Serangan balik tidak mustahil akan memberikan amunisi baru bagi semua pihak untuk kembali ke jalan dan memanas suasana, tujuannya adalah menghancurkan kredibilitas SBY. Pihak-pihak dalam *inner circle* kekuasaan akan dijadikan

sebagai target, terutama individu-individu yang 'tidak bersih', tidak cerdas, dan memiliki *hidden agenda* sendiri-sendiri. Pemilihan sasaran tampaknya lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menguak konspirasi-konspirasi yang luput dari pengamatan publik, dalam rangka memecah belah *inner circle* kekuasaan sekaligus menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Meskipun beberapa langkah dilakukan, tidak mudah bagi Presiden SBY untuk mengangkat kembali popularitasnya di dalam negeri terutama menyusul kenaikan harga BBM. Namun kalangan luar negeri mencermati sikap tegas Presiden SBY dalam insiden Monas merupakan sebuah point yang positif, sehingga muncul fenomena untuk menobatkan SBY sebagai pemimpin yang paling dipercaya se-Asia Pasifik berdasarkan *Global Survey*. Tidak diketahui tolok ukur, proses, dan metode yang digunakan dalam survei, namun hal ini bisa saja menjadi indikator bahwa pihak luar negeri juga memiliki andil dalam merekayasa popularitas SBY dari luar menjelang Pemilu 2009. Fenomena mengangkat popularitas SBY dari luar juga tidak terlepas dari manuver PM Australia Kevin Rudd yang berupaya

mendekati SBY untuk mewujudkan gagasannya membentuk *Asia Pacific Union* (APU), suatu lembaga semacam Uni Eropa di kawasan Asia Pasifik, dengan cakupan kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan keamanan. Bagi Australia, Indonesia tetap menjadi mitra penting di kawasan, termasuk menjaga kemungkinan persetujuan Indonesia atas ambisi Australia untuk memimpin APU yang akan dibentuk.

Dalam pandangan sejumlah pemerintah luar negeri, termasuk AS dan Australia, sosok SBY dinilai bersifat jelas, tegas, dan akomodatif, sehingga secara kualitas ia dinilai lebih baik ketimbang sosok-sosok lain yang akan berlaga dalam Pemilu 2009. Pada konteks tersebut, hasil penelitian *Global Survey* menjadi semakin jelas arah dan tujuannya. Dengan kata lain, insiden Monas kemudian memunculkan imbas baik yang bersifat internal maupun eksternal. Terkait dengan fenomena hasil survei, dukungan AS tersirat melalui *Chairman US Joint Chief of Staff* Admiral Mike Mullen pada kunjungannya ke Jakarta 29 Mei 2008. Insiden Monas secara khusus akan menaikkan tingkat *concern* AS terhadap Indonesia. Da-

lam perspektif AS, instabilitas keamanan di Indonesia termasuk aksi-aksi radikal sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan kawasan. Dengan demikian, terdapat simbiosis antara kepentingan eksternal termasuk jaminan dukungan atas kepemimpinan SBY di masa datang dengan upaya mendongkrak tingkat popularitas SBY.

Insiden Monas harus dilihat merupakan satu dari tiga *current issues* yang tujuannya mengarah pada pacuan 2009. Penekanannya, insiden Monas bukan sekedar kasus pelanggaran hukum biasa, tetapi sudah mengarah pada suatu bentuk penentangan terhadap negara yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar. Untuk penanganannya seharusnya digunakan instrumen militer, dengan tujuan menimbulkan efek jera dan bersifat *deterrence* terhadap pihak-pihak yang bermaksud mencoba-coba. Dari sejumlah fenomena yang muncul dan merupakan imbas dari insiden Monas, terlihat bahwa upaya membangun pencitraan SBY terus dikembangkan setelah merosot sebagai dampak kebijakan menaikkan harga BBM. Momentum insiden Monas menguatkan sinyalemen adanya kepentingan eksternal atas Indo-

nesia, sekaligus menguatkan dukungan eksternal kepada SBY sementara popularitasnya semakin merosot di dalam negeri. Dengan demikian kalkulasi politik terkait dengan upaya meningkatkan kembali popularitas SBY saat ini, tampaknya akan diwarnai benturan langsung antara kepentingan eksternal dengan agenda politik di dalam negeri. Dengan latar belakang semacam itu sulit bagi SBY untuk menyiapkan strategi yang bisa merangkul dan memuaskan semua pihak dalam rangka menghadapi pemilihan presiden 2009.

Sikap tegas Presiden SBY dalam menghadapi "tantangan" dari satu *non-state actor* meskipun sebatas tindakan hukum pada kenyataannya telah mendapat apresiasi dari banyak kalangan di dalam negeri, juga dukungan dari luar negeri, hal mana merupakan faktor kondusif bagi upaya SBY untuk lebih meningkatkan citranya di masyarakat. Namun munculnya arus balik yang mengangkat isu keterlibatan asing terkait masalah Ahmadiyah menyusul insiden Monas akan menjadi batu sandungan bagi SBY ke depan, sedikitnya hingga pemilihan presiden 2009. Dalam hal ini Presiden SBY berkepentingan untuk tetap memelihara

posisi *statusquo* terkait pencitraan yang telah berhasil diraihinya dari insiden Monas, sehingga ia akan sangat berhati-hati dalam menangani persoalan Ahmadiyah dan FPI. Bagi Presiden SBY, langkah aman yang harus diambil adalah menerapkan kebijakan moderat, baik terhadap Ahmadiyah maupun FPI.

Disepakatinya Hak Angket DPR tentang kenaikan harga BBM kendati sejak awal DPR telah bisa memahami alasan pemerintah, hal ini merupakan fenomena tersendiri yang tak terlepas dari konteks perang pencitraan. Meskipun bertujuan untuk membongkar inefisiensi di bidang energi nasional, namun Hak Angket tampaknya tidak berdasarkan pada suatu konsep yang jelas kecuali aroma politisasi yang terkesan sangat kuat. Dengan demikian, secara umum Hak Angket yang disepakati DPR diperkirakan tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermakna selain pemulihan citra DPR yang sudah terlanjur merosot. Rivalitas dalam konteks perang pencitraan muncul pula dalam kasus keberadaan *The US Naval Medical Research Unit Two*, atau lebih dikenal dengan Namru-2. Persoalan Namru-2 memperlihatkan tarik-ulur kepentingan pemerintah, suatu

hal yang tampaknya berhasil mengalihkan serangan dari para pengkritik terhadap SBY soal kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu, taktik tersebut tampaknya juga dapat *me-recover* popularitas SBY di dalam negeri, sekaligus meneguhkan kepercayaan luar negeri terhadap kepemimpinan SBY khususnya dari AS dan sekutu-sekutunya.

SKB tentang Ahmadiyah.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah akhirnya keluar tanggal 9 Juni 2008. SKB berisi peringatan yang pada dasarnya meminta agar Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan siar, yakni penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Dalam SKB tersebut Ahmadiyah tidak dibubarkan dan pemerintah masih mengakui eksistensinya sehingga perlu dilindungi dari kemungkinan tindak kekerasan.

Bagi kelompok anti Ahmadiyah, SKB ini dinilai banci karena hanya memberi peringatan, tidak membekukan, apalagi membubarkannya. Kelompok ini menyatakan akan terus menun-

tut pembubaran Ahmadiyah. Di Jakarta dan beberapa daerah lainnya berbagai elemen berunjuk rasa menuntut Ahmadiyah dibubarkan. Partai Bulan Bintang (PBB) juga mendukung ormas-ormas Islam yang menuntut pembubaran Ahmadiyah karena tindakannya dinilai telah menodai agama Islam.

Sementara itu kelompok yang peduli eksistensi Ahmadiyah cenderung menerima SKB meski dengan berat hati, karena SKB dianggap telah merampas hak warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinan. Kelompok ini bermaksud akan menggugat keputusan itu karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tentang kebebasan berkumpul dan berserikat. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membela gerakan Ahmadiyah, bahkan ia rela pasang badan untuk eksistensi kelompok tersebut.

Meskipun sudah lama dimatangkan jauh sebelum terjadinya insiden Monas, namun terbitnya SKB tentang Ahmadiyah tampaknya tak lepas dari desakan yang menuntut pemerintah agar segera membubarkan Ahmadiyah. Hal ini terindikasi SKB dikeluarkan bersamaan pada saat ribuan massa Islam melakukan aksi unjuk

rasa anti Ahmadiyah. Dikaitkan dengan pernyataan tersangka kasus insiden Monas, Munarman ketika masih berada dalam persembunyian, SKB tentang Ahmadiyah terkesan sebagai jawaban pemerintah c/q kepolisian atas tuntutan Munarman. Sebelumnya Munarman menyatakan akan menyerahkan diri jika SKB tentang Ahmadiyah dikeluarkan. Beberapa jam setelah SKB keluar memang benar Munarman menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya.

Terlepas dari ada atau tidak adanya keterkaitan antara SKB tentang Ahmadiyah dengan gelombang aksi massa anti Ahmadiyah maupun tuntutan Munarman, kenyataan ini telah memberikan kesan bahwa negara amat rentan menghadapi kekuatan massa, bahkan tidak berdaya menghadapi individu seperti Munarman. Merujuk pernyataan Presiden SBY yang mengutuk insiden kekerasan Monas dengan mengatakan negara tidak boleh kalah dengan kekerasan dari mana pun, dalam kasus ini terbukti negara seolah tak berdaya. Sebelumnya kekalahan negara juga telah dipertontonkan ketika tak berdaya menghadapi tantangan terbuka dari FPI kecuali hanya mengambil tindakan hukum.

Keputusan pemerintah dengan mengeluarkan SKB tentang Ahmadiyah yang tidak memuaskan semua pihak, begitu pula terhadap FPI yang hanya dikenai tindakan hukum, dalam implementasinya di lapangan ternyata makin mewarnai perpecahan di kalangan umat Islam. Bukan saja terbatas di tataran *elite*, tetapi bahkan sudah merambah sampai ke tingkat akar rumput. Apabila sebelumnya perpecahan di kalangan umat Islam terutama didominasi oleh perseteruan antara kelompok garis keras dan kelompok moderat, kini perpecahan di kalangan umat Islam diramalkan pula di antara kelompok moderat sendiri terutama dalam menyikapi eksistensi Ahmadiyah. Sementara itu Gus Dur yang selama ini menjadi *icon* kerukunan umat beragama di Indonesia, kini justru dilihat berada pada posisi yang lebih membingungkan di kalangan umat Islam, ditandai semakin meluasnya konflik horisontal yang melibatkan massa sesama umat Islam sendiri.

Kesimpulan.

Upaya memperbaiki citra SBY yang jatuh akibat kebijakan menaikkan harga BBM dan sejumlah gelombang

hantaman yang secara sistematis memang diarahkan untuk mereduksi citra SBY, menjadi pergulatan pentas politik nasional saat ini. Pertarungan pentas politik kontemporer Indonesia tampaknya akan terus diwarnai dengan *image war* antar para calon kandidat dalam pemilihan presiden mendatang. Konflik horisontal yang secara potensial dapat mengarah pada disintegrasi bangsa tak dapat begitu saja dilepaskan dari sikap pemerintah yang tidak memuaskan semua pihak, kendati tidak dinafikan kekuatan asing juga ikut berperan dalam rangka berupaya meraih kepentingannya di Indonesia.

Konflik horisontal yang makin meluas khususnya di kalangan umat Islam bisa saja merupakan celah pengalihan isu yang selama ini telah menjadikan popularitas SBY terpuruk menyusul kenaikan harga BBM. Namun sayangnya upaya mengangkat kembali popularitas harus dibayar mahal dengan ancaman disintegrasi bangsa yang lebih terbuka.

Sejauh mana SBY dapat tetap bertahan pada posisi yang kondusif, tampaknya sangat tergantung bagaimana SBY mampu mengelola secara cerdas kondisi konflik horisontal untuk

kepentingan politiknya terutama dalam menghadapi pemilihan presiden 2009 tanpa harus membayar mahal dengan membuka lebih lebar lagi ancaman disintegrasi bangsa. Prinsip yang harus dipegang adalah negara

tidak boleh kalah dengan kekerasan dari mana pun, termasuk tentunya tekanan-tekanan dari kekuatan luar yang senantiasa berupaya mendesakkan kepentingan mereka di negeri ini. □

